

TESIS

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG
DISELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT
(Studi Pada Hukum Adat Tengger Desa Ngadas Kecamatan Poncokusomo Kabupaten Malang)**

Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum



Oleh:

CHEVROLIANSA SANJAYA

NIM 201610380211005

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG
2019**

**EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA YANG DISELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM
ADAT (STUDI PADA HUKUM ADAT TENGGER DESA NGADAS
KECAMATAN PONCOKUSUMO KABUPATEN MALANG)**

**CHEVROLIANSA SANJAYA
201610380211005**

Telah disetujui
Pada hari/tanggal, Sabtu/ 12 Januari 2019

Pembimbing Utama

Dr. Tongat, S.H. M.Hum

Direktur



Akhmad Munir, Ph.D

Pembimbing Pendamping

Dr. Sidik Sunaryo, SH., M.Si., M.Hum

Ketua Program Studi

Magister Ilmu Hukum

Mokh Najih, S.H., M.H., Ph.D

TESIS

CHEVROLIANSA SANJAYA
201610380211005

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada hari/tanggal, Sabtu/ **12 Januari 2019**
dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Magister/Profesi di Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua / Penguji : Dr. Tongat
Sekretaris / Penguji : Dr. Sidik Sunaryo
Penguji : Dr. Haris Tofly
Penguji : Dr. Surya Anoraga

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **CHEVROLIANSA SANJAYA**

NIM : **201610380211005**

Program Studi : **Magister Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. TESIS dengan judul : **“EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DISELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT”** Adalah karya saya dan dalam naskah Tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.
2. Apabila ternyata dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur **PLAGIASI**, saya bersedia Tesis ini **DIGUGURKAN** dan **GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN**, serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Tesis ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan **HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF**.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, Mei 2019
Yang menyatakan,



CHEVROLIANSA SANJAYA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“EFEKTIVITAS PENJATUHAN SANKSI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG DISELESAIKAN DENGAN MENGGUNAKAN HUKUM ADAT”**. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

Dalam kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sedalamdalamnya kepada berbagai pihak yang telah berperan besar bagi selesainya tugas/Tesis ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan ucapan hormat yang setinggi-tingginya kepada :

1. Ibuku Sumisnani dan Bapakku Kusbiyantoro yang aku hormati dan aku sayangi, yang telah memberi kesempatan dan doanya sehingga saya dapat melanjutkan pendidikan, Istriku tercinta Amalia Loubna Santoso dan kakakku Nanda Dinasti Pramita, S.E. dan Adi Pebri Ardi, serta keponakanku Achmad Fuadi Pratama, begitu juga untuk semua keluarga yang telah memberikan dorongan doa, semangat dan motifasi pada penulis untuk menyelesaikan Tesis ini dengan baik.
2. Bapak Dr. Fauzan, M. Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Akhsanul Inam, Ph.D selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang.

4. Bapak Mokh. Najih, S.H., M.Hum., Ph.D selaku Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
5. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Tongat, S.H. M.Hum selaku dosen pembimbing I dan Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum selaku dosen pembimbing II yang penuh dengan kesabaran dan tenaga serta pikiran dalam membimbing penulis, hingga terselesaikannya penulisan tugas akhir ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah memberikan ilmu bermanfaat bagi penulis.
7. Segenap Bapak dan Ibu yang bertugas di Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
8. Rekan sejawat yang tak kenal surut akan semangat dan tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya membangun penulis harapkan guna perbaikan dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Malang, 08 Mei 2019

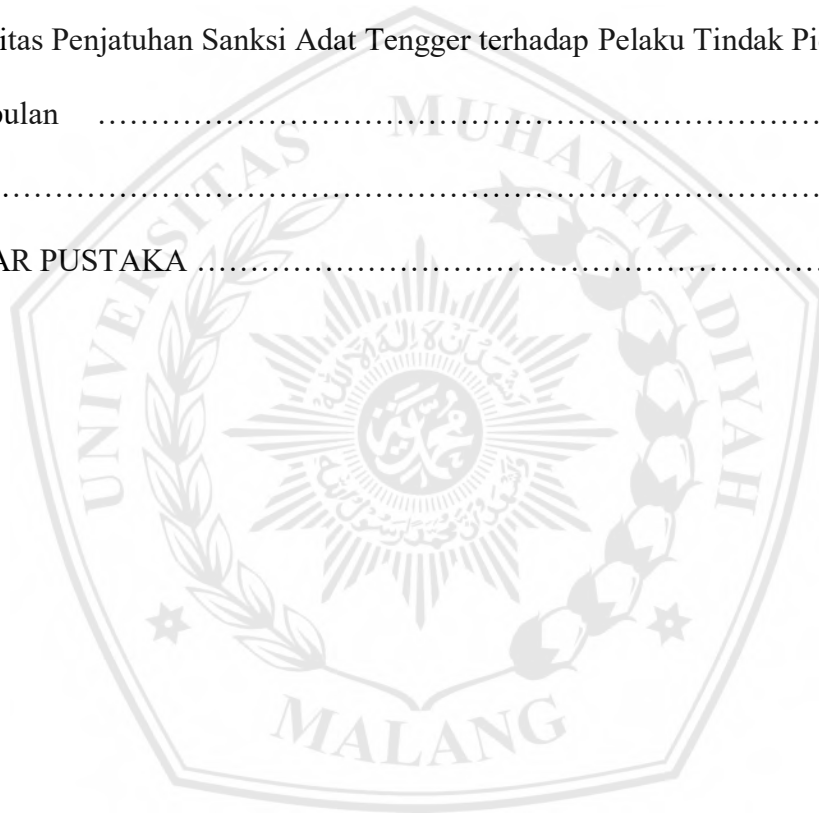
Penulis

Chevroliansa Sanjaya

DAFTAR ISI

Lembar Cover/Sampul Dalam	i
Lembar Pengesahan	i
Daftar Isi	iv
Latar Belakang	1
Rumusan Masalah	4
Penjatuhan Sanksi	4
Unsur-unsur Sanksi	6
Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana	7
Pelaku Tindak Pidana	9
Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana	10
Hukum Adat	11
Hukum Pidana Adat / Delik Adat	12
Lahirnya Delik Adat	13
Dasar Berlakunya Hukum Adat	14
Jenis Penelitian	15
Sifat Penelitian	16
Data dan Sumber Data	16
Tehnik Pengumpulan Data	16
Proses Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Tengger	18
Proses Penjatuhan Sanksi Dalam Hukum Nasional	19
Proses Penjatuhan Sanksi Adat Tengger Terhadap Pelaku Tindak Pidana	24

Putusan Adat Digunakan Sebagai Pertimbangan di dalam Proses Peradilan Umum	31
Efektivitas Penjatuhan Sanksi yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana yang Diselesaikan dengan Menggunakan Hukum Adat dalam Masyarakat Adat Tengger.....	37
Hukum Adat Ditinjau Dari Segi Kebudayaan	34
Hukum Adat Ditinjau Dari Sosilogi	35
Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Nasional	35
Efektivitas Penjatuhan Sanksi Adat Tengger terhadap Pelaku Tindak Pidana	32
Kesimpulan	44
Saran	45
DAFTAR PUSTAKA	46



ABSTRAK

Chevroliansa Sanjaya: Efektivitas Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat. Dr. Tongat, S.H. M.Hum., Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.

Penyelesaian secara hukum adat terhadap tindak pidana ringan sangat diharapkan keberadaannya oleh masyarakat, karena untuk memenuhi rasa keadilan dalam penyelesaian perkara, sehingga mendapatkan kepastian hukum sesuai keinginan masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dalam hal ini, penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana ringan dengan menggunakan hukum adat Tengger, merupakan tindakan yang tepat bagi masyarakat adat di Tengger dan yang lebih utama adalah pemberian sanksi tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai efektivitas penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat. Terdapat rumusan masalah terkait penelitian ini, : 1) Bagaimakah proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger, 2) Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dalam masyarakat adat Tengger. Untuk mencapai tujuan maka penelitian melakukan penelitiannya dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang mana penulis akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan terkait proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger. Yang nantinya dengan itu diketahui efektivitas pemberian sanksi adat terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan sanksi dan dapat dijadikan acuan terhadap pembentukan pembaharuan hukum pidana nasional yang didasarkan atas pertimbangan hukum adat, tidak hanya hukum adat Tengger saja, akan tetapi dipertimbangkan hukum adat daerah lain yang secara positif dapat

membentuk suatu hukum pidana nasional yang bernafaskan budaya atau kultur asli masyarakat Indonesia

Kata Kunci : Efektivitas, Penjatuhan Sanksi, Hukum Adat Tengger.



ABSTRACT

Chevroliansa Sanjaya : The Effectiveness of Imposing Sanctions Against Perpetrators of Criminal Actions Resolved Using Customary Law. Dr. Tongat, S.H. M. Hum., Dr. Sidik Sunaryo, S.H., M.Si., M.Hum.

The existence of customary law against minor criminal acts is very much expected by the community, because to fulfill a sense of justice in the settlement of cases, so as to obtain legal certainty according to the wishes of the people and also not contrary to national law. In this case, the imposition of sanctions on perpetrators of minor crimes using Tengger's customary law is an appropriate action for indigenous peoples in Tengger and more importantly, the provision of such sanctions does not conflict with the laws in force in Indonesia.

The research is aimed at identifying and analyzing the effectiveness of the imposition of sanctions on perpetrators of crimes that are settled using customary law. There is a formulation of the problem related to this research: 1) How is the process of imposing sanctions on perpetrators of crimes resolved by using Tengger's customary law, 2) How is the effectiveness of imposing sanctions given to perpetrators of crimes resolved by using customary law in the Tengger indigenous community. To achieve the objectives, the research carried out research using an empirical juridical approach or field research, in which the author will conduct research and collect data relating to the issues raised. In this study, the authors conducted field research related to the process of imposing sanctions on perpetrators of crimes that were resolved using Tengger's customary law. Later, it will be known the effectiveness of customary sanctions against perpetrators of criminal acts that are sanctioned and can be used as a reference to the formation of renewal of national criminal law based on customary law considerations, not only Tengger customary law, but also consider other customary laws that are positively can form a national criminal law that breathes the culture or culture of the original Indonesian people.

Keywords: *Effectiveness, Imposition of Sanctions, Tengger Customary Law*

Latar Belakang

Hukum adat adalah hukum tidak tertulis, dia berkembang dan tumbuh dalam setiap kelompok masyarakat sebagai aturan hidup masyarakat yang dipelihara dan ditaati oleh setiap kelompok masyarakat. Hukum adat itu berbeda-beda antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain, dan selalu dipertahankan kemurniannya yang merupakan warisan turun menurun, seperti halnya dalam hukum adat Tengger di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, terdapat bermacam corak hukum adat Tengger dan sanksi-sanksi pidana adat pun tidak sama misalnya antara sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat adat Tengger di daerah Probolinggo dengan sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat adat Tengger yang berada di wilayah Kabupaten Malang, karena hukum adat adalah hukum tempat artinya lain tempat atau daerah maka hukum adatnya juga berbeda.

Hukuman atau sanksi-sanksi adat yang terdapat dalam masyarakat hukum adat sampai dengan sekarang tetap dijaga dan dipertahankan sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah, norma-norma yang ada. Di pertahankannya hukum adat ini bagi masyarakat hukum adat, sesuai dengan kaidah-kaidah dan aturan dalam agama yang dianut oleh masyarakat adat Tengger seperti agama Budha dan Hindu, serta prinsip-prinsip keadilan lainnya.

Lahirnya hukum adat dan sanksi-sanksi adat tidak terlepas dari akibat adanya suatu pelanggaran atau kejahatan yang menurut hukum Adat dipandang sebagai kejahatan dan dapat merusak rasa nyaman, tenteram dan rasa damai dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga bagi pelaku dan pelanggar tersebut sesuai dengan sanksi adat merupakan suatu balasan atau pelajaran bagi si pelaku kejahatan supaya tidak

mengulanginya lagi, bahkan menurut hukum adat tidak hanya berguna bagi si pelaku saja tetapi juga berlaku bagi setiap orang, supaya tidak melakukan kejahatan¹.

Tujuan pemberian sanksi adat kepada masyarakat atau pelaku kejahatan adalah menurut hukum adat karena seseorang itu telah merampas hak-hak masyarakat. Dalam UUD 1945, Pasal 18B (2) negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Bushar Muhammad dengan mengacu pada pendapat Soekanto, mengemukakan kompleks adat inilah yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifisir (*ongecodificeerd*) dan bersifat paksaan (*dwang*) mempunyai sanksi (dari itu hukum) jadi mempunyai akibat hukum (*rechtsgevolg*), kompleks ini disebut hukum adat (*adatrecht*)². Jadi maksud Soekanto ialah hukum adat itu merupakan seluruh adat (yang tidak tertulis) dan hidup dalam masyarakat berupa kesusilaan, kebiasaan, dan kelaziman yang mempunyai akibat hukum.

Masyarakat adat Tengger di wilayah desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, sampai saat ini masih terikat pada ketentuan hukum adat yang dijadikan instrumen pengendali tata kehidupan sosial dan sumber daya alam setempat. Siapapun yang melanggar ketentuan hukum adat akan berhadapan dengan peradilan adat. Setiap konflik, sengketa atau perselisihan dikalangan masyarakat adat Tengger diselesaikan melalui putusan peradilan adat yang diputuskan oleh kepala Dukun atau para tokoh adat sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di masyarakat Tengger.

¹Airi Safrijal (2012), *Kajian Normatif Terhadap Sanksi Adat Sebagai Pengganti Pidana Penjara (Suatu Penelitian Dalam Wilayah Hukum Masyarakat Adat Aceh Kabupaten Nagan Raya)* (Tesis). Diakses pada 31 Agustus 2018 pukul 10.33 dari www.academia.edu/artikel_tesis.

² Bushar Muhammad, *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*. Jakarta, Pradnya Paramita: 1994, Cet. 9, hal. 11.

Hukum adat delik (*adatdelicten recht*) dan dapat juga disebut hukum pidana adat atau hukum pelanggaran adat, ialah aturan-aturan hukum adat yang mengatur peristiwa atau perbuatan atau kesalahan yang berakibat terganggunya keseimbangan masyarakat, sehingga perlu diselesaikan (dihukum) agar keseimbangan masyarakat tidak terganggu.³ Dengan demikian, yang diuraikan dalam hukum adat delik adalah tentang peristiwa dan perbuatan yang bagaimana merupakan “delik adat” dan bagaimana menyelesaikannya sehingga keseimbangan masyarakat tidak lagi merasa terganggu.

Oleh karena itu, terjadinya kasus-kasus tindak pidana seperti halnya tindak pidana pencurian yang ada di masyarakat Tengger, yang penyelesaian dari tindak pidana tersebut melalui peradilan hukum adat telah menimbulkan delematis penegakan hukum tersendiri. Di satu sisi menurut putusan hukum adat Tengger, apabila kasus tindak pidana pencurian sudah diselesaikan melalui peradilan adat ataupun kesepakatan adat yang diputuskan oleh kepala Dukun, maka kasus tersebut dinyatakan sudah selesai dan tidak akan dilanjutkan lagi ke peradilan tindak pidana umum.

“Menurut Oemar Seno Adji (dalam Andi Hamzah) pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana kedalam kehidupan masyarakat”⁴.

³ Hilman, Hadikusuma. 1992. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju, hal. 230.

⁴ Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 32.

Pada perkembangan selanjutnya, pidana tidak hanya ditujukan untuk membalas perbuatan seseorang semata, tetapi lebih mengutamakan tujuan dari pembedaan yaitu pencegahan yang ditujukan pada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana dan mencegah penjahat mengulangi kejahatan melakukan perbuatan jahat yang direncanakannya. Oleh karena itu, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan yang antara lain : (1). Bagaimakah proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger ?, (2). Bagaimanakah efektivitas penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dalam masyarakat adat Tengger ?

Penjatuhan Sanksi

Sanksi merupakan suatu langkah hukuman yang dijatuhkan oleh negara atau kelompok tertentu karena terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana, sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.⁵ Sanksi dalam konteks hukum merupakan hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Dalam konteks sosiologi maka sanksi adalah kontrol sosial.

Menurut Asshiddiqie dan Safaat⁶, “Sanksi pada awalnya hanya terdapat satu macam sanksi, yaitu sanksi kriminal berupa hukuman dalam arti sempit dengan kehidupan, kesehatan atau kepemilikan, sanksi pidana tujuannya adalah *retributive*

⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Alumni: Bandung. hlm. 1.

⁶ Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Konstitusi Pers, Jakarta 2014.

atau menurut pandangan modern adalah adanya pencegahan (*deterrence, prevention*)”.

Istilah sanksi atau hukuman berasal dari kata dasar “hukum” yang berarti menetapkan hukum, atau memutuskan tentang hukum untuk suatu peristiwa yang tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana, tetapi juga hukum perdata⁷.

Menurut *Black's Law Dictionary*, *sanction* (sanksi) adalah “*a penalty or coercive measure that results from failure to comply with a law, rule, or order (a sanction for discovery abuse)*” atau sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan untuk mematuhi undang-undang.⁸ Sanksi pidana memang mempunyai sifat memaksa, dimana jika seseorang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang sudah diatur sebelumnya wajib dikenai sanksi pidana.

Dalam konteks hukum pidana adat, dalam hukum adat masyarakat Tengger. Sanksi merupakan hukuman berupa denda yang diberikan oleh tokoh adat kepada pelaku tindak pidana yang terbukti telah melakukan perbuatan atau tindakan kejahatan yang dilakukan di daerah adat setempat, dalam hal ini adalah di daerah adat Tengger. Sanksi diberikan melalui proses adat dan tidak ada kewenangan dari pihak manapun untuk serta merta menjatuhkan sanksi pada pelaku tindak pidana tanpa melalui proses adat yang sudah ditentukan dan disepakati bersama oleh masyarakat dan tokoh adat setempat.

⁷ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi I, Cet.III, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 71-72. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi II, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁸ Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia Pustaka: Jakarta. hlm. 191.

Unsur-unsur Sanksi

Sanksi atau hukuman adalah sebuah sinonim dari pembedaan, atau pemberian penjatuhan pidana oleh hakim⁹. Jika hukum dipandang sebagai kaidah, maka tidak boleh tidak, harus diakui sanksi sebagai salah satu unsur esensialnya. Hampir semua yuris yang berpandangan dogmatik memandang hukum sebagai kaidah bersanksi yang didukung oleh otoritas tertinggi di dalam masyarakatnya.¹⁰

Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam Assaad, “bahwa sanksi tidak lain merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi pelanggaran kaidah sosial”. Berdasarkan beberapa pengertian sanksi tersebut, setidaknya sanksi mengandung unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

1. Sanksi merupakan reaksi, akibat, atau konsekuensi dari pelanggaran atau penyimpangan kaidah sosial (baik kaidah hukum maupun kaidah non hukum);
2. Sanksi merupakan kekuasaan atau alat kekuasaan untuk memaksakan ditaatinya kaidah sosial tertentu;
3. Khusus mengenai sanksi hukum, pada garis besarnya dapat dibedakan atas: (1). Sanksi privat dan; (2). Sanksi publik.

Dengan demikian, norma atau kaidah hukum sebagai salah satu jenis norma atau kaidah sosial, jelas membutuhkan unsur sanksi sebagai unsur esensialnya. Hukum adat sendiri memiliki beberapa unsur untuk seseorang dijatuhi sebuah sanksi diantaranya (1). Reaksi masyarakat setempat terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana yang dilakukan di daerah adat setempat berupa *kegeraman* warga sekitar terhadap tindakan yang dianggap tabu oleh masyarakat sekitar contohnya tindak pidana pencurian atau pelaku pencurian, (2). Akibat yang ditimbulkan oleh perilaku tindak pidana (pencurian) di daerah adat adalah kerugian

⁹A. Istiqlal Assaad dalam jurnal *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Vol. 19 No. 01 Januari-April 2017, hal. 121.

¹⁰ *Ibid*, Achmad Ali, hal. 42.

¹¹ *Ibid*.

materiil, dan akibat lainnya adalah kerugian non materiil yaitu perilaku buruk tersebut dapat dicontoh oleh anak-anak kurang paham terhadap hukum. Dimana perilaku atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain konsekuensinya adalah diberikan sanksi, dalam hal hukum adat adalah penjatuhan sanksi berupa denda, apabila pelanggaran yang dilakukan dianggap ringan oleh tokoh adat setempat.

Tujuan Penjatuhan Sanksi Pidana / Penjatuhan Sanksi

Menurut Andi Hamzah¹², “Tujuan pidana biasa disingkat dengan tiga R dan satu D. Tiga R itu ialah *Reformation*, *Restraint*, dan *Retribution*, sedangkan satu D, ialah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* dan *general deterrence* (pencegahan khusus dan pencegahan umum)”. *Reformation* (Reformasi) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat menjadi orang baik, dan berguna bagi masyarakat. *Restraint* maksudnya mengasingkan pelanggar dari masyarakat. Dengan tersingkirnya pelanggar hukum dari masyarakat berarti masyarakat itu akan menjadi lebih aman. *Retribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan. *Deterrence* berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual, maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa”.

Tujuan pidana yang berlaku sekarang, ialah variasi dari bentuk-bentuk: penjeraan (*deterrent*), baik ditujukan kepada pelanggar hukum sendiri, maupun kepada mereka yang mempunyai potensi menjadi penjahat; perlindungan kepada masyarakat dari perbuatan jahat; perbaikan (reformasi) kepada penjahat¹³. Yang tersebut terakhir yang paling modern dan populer dewasa ini. Bukan saja bertujuan memperbaiki kondisi pemenjaraan, tetapi juga mencari alternatif lain yang bukan bersifat pidana dalam membina pelanggar hukum.

¹² Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ed. Revisi, Rineke Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 28.

¹³ *Ibid*, Andi Hamzah, hal. 29

Menurut Sholehuddin¹⁴, “Menentukan tujuan pemidanaan menjadi persoalan yang dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana sebagai pencegahan tingkah laku yang anti sosial. Menentukan titik temu dari dua pandangan tersebut jika tidak berhasil dilakukan, memerlukan formulasi baru dalam sistem atau tujuan pemidanaan dalam hukum pidana. Pemidanaan mempunyai beberapa tujuan yang bisa diklasifikasikan berdasarkan teori-teori tentang pemidanaan”.

Berpijak pada tujuan pidana tersebut, muncullah teori-teori tentang pemidanaan.

Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuan pidana:

- a. Teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*) ;
- b. Teori relatif atau tujuan (*doeltheorien*) ;
- c. Teori gabungan (*verenigingstheorien*).

Dalam Rancangan KUHP nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuan pidana, yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
2. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang yang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5).

Dalam ayat 2 pasal itu, ditegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam rancangan KUHP tersebut, merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

¹⁴ Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. hlm. 61.

Dengan demikian dalam Rancangan KUHP berbanding lurus dengan penjatuhan sanksi yang terdapat didalam hukum adat utamanya pada adat Tengger. Seperti halnya terdapat didalam ayat (1) dan ayat (3) tersebut diatas. Bahwasanya peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam penjatuhan sanksi pidana, dan ini juga sudah diterapkan di dalam masyarakat adat Tengger secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Dimana peran masyarakat sangat dominan untuk mengawal proses penjatuhan sanksi yang diterapkan pada pelaku tindak pidana.

Pelaku Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.¹⁵ Perbuatan pidana adalah perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menimbulkan peristiwa pidana atau perbuatan melanggar hukum pidana dan diancam dengan hukuman.¹⁶

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana;
 1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

¹⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana.* , 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung. Hlm 70.

¹⁶ *Ibid*, hal. 83.

Dalam hukum adat Tengger yang disebut sebagai pelaku tindak pidana adalah seseorang yang telah melakukan atau melanggar ketentuan hukum nasional. Akan tetapi, dalam proses pemberian dan penjatuhan sanksinya tidak menggunakan hukum nasional sebagaimana ketentuan didalam kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), melainkan menggunakan hukum adat sebagai hukum yang telah disepakati oleh masyarakat dan tokoh adat, untuk dipergunakan dalam memberikan suatu sanksi pada orang yang telah melanggar norma atau kaidah.

Klasifikasi Pelaku Tindak Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹⁷

Menurut Kansil dan Kansil,¹⁸ “Tindak pidana atau delik ialah tindak yang mengandung 5 (lima) unsur”, yaitu:

1. Harus ada sesuatu kelakuan (*gedraging*);
2. Kelakuan itu harus sesuai dengan uraian undang-undang (*wettelijke omschrijving*);
3. Kelakuan itu adalah kelakuan tanpa hak;
4. Kelakuan itu dapat diberatkan kepada pelaku;
5. Kelakuan itu diancam dengan hukuman.

¹⁷ Moeljatno, *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta, 2002, Jakarta, hlm. 54.

¹⁸ C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, 2007, Jakarta, hlm. 37.

Adat Tengger tidak mengklasifikasikan suatu tindak pidana atau pelaku tindak pidana. Dalam adat Tengger, hanya mengklasifikasi suatu perbuatan-perbuatan yang mana termasuk suatu pelanggaran kecil dan yang mana termasuk suatu pelanggaran besar. Masyarakat adat Tengger sendiri menyebutnya sebagai *salah alit* dan *salah ageng*. Klasifikasi tersebut untuk membedakan tindakan/ perlakuan kepada pelaku, baik proses penjatuhan sanksi dan sanksi apa yang patut diberikan kepada pelaku yang telah melanggar norma atau kaidah dalam adat atau bahkan melanggar hukum nasional.

Hukum Adat

Hukum adat adalah peraturan yang lahir dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat, yang kemudian menjadi pedoman, aturan dan kaidah disepakati bersama oleh masyarakat di daerah tersebut.

Menurut Sukanto¹⁹, dalam buku beliau “*Meninjau Hukum Adat Indonesia*” mengartikan hukum adat sebagai kompleks adat-adat yang kebanyakan tidak dicitak, tidak dikodifikasi dan bersifat paksaan, mempunyai sanksi, jadi mempunyai akibat hukum.

Hukum adat mengandung dua dimensi, yaitu dimensi formal dan materiil. Dalam dimensi formal hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis. Sedangkan dimensi materiilnya hukum adat adalah sistem norma yang mengekspresikan perasaan keadilan masyarakat.²⁰

Dengan demikian, apabila dilihat dari pengertian-pengertian yang diberikan oleh para sarjana tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa hukum adat itu adalah

¹⁹ Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, hal. 14.

²⁰ Ratno, Lukito. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras. Hal. 18.

suatu norma-norma yang bersumber pada perasaan keadilan masyarakat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan-peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, senantiasa ditaati dan dihormati oleh rakyat, karena mempunyai akibat hukum (sanksi). Maksud dari keadilan tersebut ialah *Ilustitia est constans et perpetua ius suum cuique tribuere* yang artinya memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi bagian atau haknya, bagian atau hak setiap orang tidak sama.²¹

Hukum Pidana Adat / Delik Adat

Hukum adat delik merupakan suatu tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutan guna memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan itu, maka terjadi reaksi-reaksi adat.²²

Menurut Soepomo (dalam Busrah Muhammad)²³, di dalam hukum adat tidak mengenal sistem “*prae-existente regels*”, berarti hukum adat tidak mengenal sistem pelanggaran atau perbuatan kejahatan yang telah ditetapkan lebih dahulu, untuk dapat dikenakan hukuman atau tindakan balasan atau perbuatan pengembalian keseimbangan. Jadi tidak mengenal semacam pasal 1 KUHP, tetapi KUHPnya adalah seluruh kehidupan ini di dalam totalitasnya, yaitu seluruh lapangan kehidupan menjadi buku terbuka yang memuat hal apa yang dilarang dan hal apa yang diperbolehkan. Hanya TerHaar menambahkan, alasan-alasan untuk gangguan keseimbangan serta pemulihan keseimbangan, banyak ditentukan oleh suatu unsur yang sangat pribadi sifatnya, yaitu unsur “merasa malu” atau unsur “tersinggung perasaannya”, sehingga malu seperti rasa tidak enak, rasa amarah, rasa balas dendam dari orang yang terkena di satu pihak terhadap orang yang menyinggung baik berdasarkan kelalain atau sengaja di lain pihak.

²¹ Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum sebuah sketsa*. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 23-24.

²² *Ibid*, hal. 288.

²³ Muhammad, Bushar. 1981. *Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, hal. 58.

Pada hakikatnya delik adat merupakan salah satu faktor, dimana hukum adat itu berlaku di dalam masyarakat. Sehingga delik adat akan bekerja apabila ada tindakan masyarakat yang bertentangan dengan adat setempat atau dengan hukum positif.

Lahirnya Delik Adat

Hukum adat tidak mengenal sistem peraturan yang statis. Dengan sendirinya tidak ada sistem hukum pelanggaran adat yang statis pula. Tiap-tiap peraturan hukum timbul, berkembang dan selanjutnya lenyap dengan lahirnya peraturan baru, sedang peraturan baru itu berkembang juga, tetapi kemudian akan lenyap pula dengan adanya perubahan rasa keadilan yang menimbulkan perubahan peraturan.

“Begitu pula delik adat (pelanggaran hukum adat) lahir, berkembang dan kemudian lenyap, artinya : tindakan-tindakan yang mula-mula merupakan pelanggaran hukum, lambat laun tidak lagi melanggar hukum karena hukum berubah. Segala sesuatu berjalan sesuai dengan jalannya perubahan rasa keadilan rakyat. Dan rasa keadilan itu bergerak berhubungan dengan pertumbuhan hidup masyarakat yang selalu dipengaruhi oleh segala faktor lahir dan batin”.²⁴

Terjadinya delik adat apabila tata-tertib adat setempat dilanggar, atau dikarenakan adanya suatu pihak merasa dirugikan, sehingga timbul reaksi dan koreksi dan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu.

Menurut Hilman, delik-delik adat itu berbeda antara daerah yang satu dan daerah yang lain, misalnya di Lampung berlaku adat pemuda berkunjung ke belakang rumah gadis pada malam hari (*manjau mulei*, *nyubuk mulei*) untuk mengadu kasih cinta, tetapi di Aceh perbuatan yang demikian itu dilarang karena merupakan delik adat²⁵.

Maka apabila delik adat itu terjadi, tetapi masyarakat setempat tidak lagi merasa terganggu keseimbangannya, sehingga tidak ada reaksi atau koreksi, terhadap si

²⁴ Imam Sudiyat. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty, hal.177.

²⁵ *Ibid*, hal. 235

pelaku. Maka perbuatan itu bukan lagi delik adat, atau delik yang mengakibatkan hukum.

Dasar Berlakunya Hukum Adat

Pemberlakuan hukum adat di Indonesia memiliki beberapa sumber hukum dalam berlakunya hukum adat sebagai hukum yang hidup dan berkembang secara alami di masyarakat. Tentunya penegakan dan/ pemberlakuan hukum adat sendiri terdapat beberapa rujukan sumber hukum dan dasar berlakunya hukum adat tersebut di suatu daerah yang menjadikan hukum adat sebagai hukum positif mereka.

Pengakuan terhadap hukum tidak tertulis dahulu hanya dijelaskan atau dicantumkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945 angka I yang menyebutkan: "...Undang-Undang Dasar itu berlakunya juga hukum dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis". Selain Penjelasan UUD 1945 dapat kita lihat dalam pembukaan UUD 1945 pada pokok-pokok pikiran yang menjiwai perwujudan cita-cita hukum dasar negara adalah Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai sumber tertib hukum sangat besar artinya bagi hukum adat, karena hukum adat justru mempunyai akar kepada kebudayaan, sehingga dapat mewujudkan perasaan hukum yang nyata dan hidup dikalangan rakyat Indonesia.²⁶

Menurut Tongat, yang mengemukakan beberapa ketentuan dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum/ legitimasi digunakannya hukum tidak tertulis/ hukum adat sebagai sumber hukum, yaitu antara lain:²⁷

- a. Undang-undang Darurat Nomor 1 tahun 1951

²⁶ Dewi Wulansari. 2010. Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar. Bandung: PT. Refika Aditama. Hal. 104-105.

²⁷ Tongat, 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMMPers : Malang. Hal. 35.

- b. Undang-undang tentang kekuasaan kehakiman atau undang-undang Nomor 48 tahun 2009, yang menyatakan antara lain: Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1)

Dengan adanya aturan hukum atau dasar berlakunya hukum adat yang mengakui adanya hukum adat, maka hukum pidana adat yang diterapkan kepada masyarakat adat adalah suatu putusan yang *legitimate* dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tokoh-tokoh adat yang menjatuhkan hukuman adat kepada pelaku tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah yuridis empiris atau penelitian lapangan, yang mana penulis akan melakukan penelitian dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yakni tentang hukum pidana adat mengenai efektivitas penerapan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger. Menurut Amiruddin dan Asikin,²⁸ “bahwa kegunaan penelitian hukum empiris adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan termasuk proses penegakan hukum (*law enforcement*)”. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian lapangan terkait proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger.

Sifat Penelitian

Sifat penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu

²⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal. 134

gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.²⁹

Data-data serta informasi-informasi yang didapatkan akan digunakan sebagai bahan yang nantinya akan dikaji dan disusun sehingga mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang diangkat.

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah : Data primer dan Data sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa cara guna mengumpulkan informasi-informasi yang dibutuhkan penulis dalam penulisan hukum ini yakni antara lain :

Data Primer

Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian³⁰.

Berikut adalah daftar narasumber :

1. Bapak Sutomo sebagai Kepala Dukun suku Tengger di desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

²⁹ Ibid hal 25

³⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 84

2. Bapak Mujiyanto. M.R sebagai Kepala desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
3. Bapak Suprianto sebagai toko pemuda/ karangtaruna sekaligus sebagai ketua RT di salah satu desa Ngadas.
4. Bapak Pergianto sebagai Kepala dusun/ Kamituo/ toko masyarakat desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.

Obserbvasi

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, khususnya menyangkut ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia³¹. Proses observasi bergerak melalui rangkaian aktivitas bervariasi, dan selalu disesuaikan dengan kebutuhan dan situasionalnya³². Observasi yang akan dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut : (1). Observasi pada penyelesaian terhadap beberapa perkara pidana yang pernah terjadi di Tengger, misalnya pencurian kayu dan sayuran. (2). Observasi terhadap sanksi-sanksi yang diberikan.

Data Sekunder

Salah satu jenis penelitian bila dilihat dari tempat pengambilan data adalah penelitian kepustakaan (*library research*)³³. Disebut penelitian kepustakaan karena data-data atau bahan-bahan yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian tersebut berasal

³¹ Adler dan adler dalam hasyim hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosiaol), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016, hlm 26.

³² hasyim hasanah “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosiaol), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016, hlm 31.

³³ Nursapia Harahap “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam jurnal *iqra*’ volume 8, no 1, mei 2014,(Medan : IAIN-SU Medan) hlm 68.

dari perpustakaan baik berupa buku, ensklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah dan lain sebagainya³⁴.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Proses Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana yang diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Tengger

Dalam hukum pidana nasional atau hukum positif yang berlaku secara nasional di Indonesia, penjatuhan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana di Indonesia melalui proses yang panjang yaitu melalui proses peradilan pidana (*the criminal justice proses*).

Oleh karenanya, menurut Roslan Saleh dalam Adami Chazawi, “menegaskan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja dilimpahkan Negara kepada pembuat delik”³⁵. Dan ini berbanding terbalik dengan penjatuhan sanksi pada hukum adat Tengger, walaupun tujuannya sama antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana adat yaitu membuat si pelaku jerah atau nestapa akan perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya. Dalam hukum adat Tengger sendiri, lebih mementingkan proses-proses musyawarah, supaya dalam penjatuhan sanksi adat nantinya tidak terjadi dendam antara korban dan pelaku, karena yang menghukum adalah adat bukan negara, seperti halnya pendapat Roslan Saleh diatas.

³⁴ Sutrisno Hadi dalam Nursapia Harahap “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam jurnal iqra’ volume 8, no 1, mei 2014,(Medan : IAIN-SU Medan) hlm 68.

³⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I, Jakarta*, Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 81.

Hukuman atau sanksi dalam hukum pidana nasional berbeda dengan hukum adat di Tengger. Dalam hukum pidana nasional ada beberapa jenis pidana yang diatur didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 10 yaitu:

- a. Pidana Pokok
 1. Pidana mati;
 2. Pidana penjara;
 3. Pidana kurungan;
 4. Pidana denda;
 5. Pidana tutupan.(UU No.20/1946)
- b. Pidana Tambahan
 1. Pencabutan hak-hak tertentu;
 2. Perampasan barang-barang tertentu;
 3. Pengumuman putusan hakim.

Sedangkan didalam hukum pidana adat di Tengger, hanya mengenal saksi adat atau hukuman adat yang berupa saksi denda dan sanksi sosial. Tujuan sanksi hukum adat di Tengger ini, menurut penulis sesuai dengan apa yang ada di dalam pasal 54 RKUHP tahun 2005, bahwasannya tujuan dari sanksi pembedaan itu adalah untuk menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, membebaskan rasa bersalah pada terpidana, serta memaafkan terpidana.

Proses Penjatuhan Sanksi Dalam Hukum Nasional

Penjatuhan pidana atau pembedaan merupakan konsekuensi logis dari perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu berupa pidana. Pada umumnya istilah pidana dan pembedaan artinya hampir sama, yaitu hukuman dan penghukuman atau dihukum yang berupa penderitaan. Perbedaannya adalah penderitaan pada tindak pidana lebih kecil atau lebih ringan dari pada penderitaan yang diakibatkan oleh penjatuhan pidana. Seperti misalnya pada anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan

peraturan perundang-undangan hakim dapat menjatuhkan tindakan berupa menyerahkan anak itu kepada orang tua atau kepada Negara untuk pembinaan yang merupakan penderitaan bagi anak itu sendiri. Akan tetapi penderitaan tersebut masih ringan bila dibandingkan dengan pidana penjara yang biasa dijatuhkan pada siapapun pelaku pidana diatas 18 tahun.

Proses pertama dalam penjatuhan pidana pada pelaku tindak pidana diawali dengan proses penyidikan. Penyidikan merupakan tahap awal dari proses penegakan hukum pidana atau bekerjanya mekanisme Sistem Peradilan Pidana. Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititikberatkan pada upaya pencarian atau pengumpulan “bukti faktual” penangkapan dan pengeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang di duga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi³⁶.

Dalam proses ini pelaku tindak pidana masih berstatus sebagai tersangka, baik di tingkat penyidikan dan penuntutan. Apabila penyidikan diperlukan proses penahanan oleh penyidik, maka jangka waktu penahanannya yaitu 20 hari dapat diperpanjang 40 hari, sesuai amanat pasal 24 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Penyidikan mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dan strategis untuk menentukan berhasil tidaknya proses penegakan hukum pidana selanjutnya. Pelaksanaan penyidikan yang baik akan menentukan keberhasilan Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan dan selanjutnya memberikan

³⁶ Ali Wisnubroto. *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm 15.

kemudahan bagi hakim untuk menggali atau menemukan kebenaran materiil dalam memeriksa dan mengadili di persidangan.³⁷

Selanjutnya adalah proses penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Dalam proses ini dilakukan pelimpahan perkara dilengkapi dengan berkas perkara, tersangka dan alat bukti lainnya. Apabila dalam waktu 7 hari tidak ada pemberitahuan dari kejaksaan, maka berkas dinyatakan P-21 dan siap dilakukan penuntutan. Akan tetapi, jika berkas dirasa kurang lengkap, maka berkas dikembalikan dengan dilengkapi saran tentang kekurangan. Penyidik diberikan waktu selama 14 hari untuk melengkapi berkas, jika melewati batas itu, penyidikan dapat dihentikan.

Sama dengan proses penyidikan, dalam proses penuntutan, penuntut umum juga dapat menahan tersangka untuk mempermudah dalam proses penuntutan. Jangka waktu yang diberikan oleh KUHAP dalam pasal 25 ayat (1) dan (2) adalah 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari.

Setelah penuntutan selesai kemudian berkas dari penuntut umum diserahkan ke panitera pengadilan negeri setempat untuk kemudian di sidangkan oleh hakim yang ditunjuk. Dalam undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatur bahwa hakim bebas dalam menjatuhkan putusan, namun Pasal 50 undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan hakim dalam memberikan putusan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-

³⁷ Zulkarnaen Koto. *Terobosan Hukum dalam Penyederhanaan Proses Peradilan Pidana*, Jurnal Studi Kepolisian, STIK, Jakarta, 2011, hlm 150

peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

Hakim sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu harus mempertimbangkan mengenai salah tidaknya seseorang atau benar atau tidaknya suatu peristiwa dan kemudian memberikan atau menentukan hukumannya. Menurut Sudarto hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwa, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya;
- b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana;
- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Hakim berdasarkan undang-undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 undang-undang No. 48 Tahun 2009 sebagai berikut:

“Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.”

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim.

Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Pada pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menegaskan tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan demikian, tujuan dari pidana bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pidana yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, di samping ingin mencapai tujuan pidana itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Menurut hemat penulis, dalam proses penjatuhan sanksi atau hukuman dalam hukum pidana nasional terlalu panjang, bayangkan untuk proses sampai di Pengadilan tingkat pertama saja, apabila di maksimalkan waktunya mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pengadilan, dapat memakan waktu lebih kurang 200 (dua ratus) hari.

Oleh karena itu, apabila ditarik sebuah kesimpulan, penulis berpendapat bahwasanya permasalahan yang mendasar proses di adat sangat cepat dan sederhana dibandingkan dengan proses pada hukum pidana nasional adalah bahwa di dalam hukum adat Tengger selain menjaga harkat dan martabat pelaku, juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena apabila dalam hukum pidana nasional stigma negatif akan berpengaruh tidak hanya kepada pelaku akan tetapi juga kepada keluarga pelaku. Inilah yang coba di hilangkan oleh hukum adat Tengger, supaya perilaku yang dilakukan oleh salah seorang keluarga, tidak membuat stigma negatif kepada keluarga lain yang tidak melakukan perbuatan yang dianggap jahat, dengan cara mengadilinya dalam lingkup masyarakat adat Tengger saja, dengan proses yang cepat, sehingga pelaku tidak merasa terbebani dengan proses yang sangat panjang, seperti halnya dalam proses pembedaan.

Proses Penjatuhan Sanksi Adat Tengger Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Proses penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat Tengger. Penulis akan menjelaskannya berdasarkan hasil wawancara penelitian dengan informan-informan selama penelitian berlangsung, baik dengan ketua Dukun, pegawai desa, kepala dusun, kamituo, maupun warga masyarakat di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang.

Sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana dalam hukum adat Tengger dalam prakteknya, maka aparat desa Ngadas yang akan bertindak untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pelaku dikenakan sanksi sesuai dengan keputusan sidang desa yang dipimpin oleh kepala desa. Sidang yang diselenggarakan di balai desa atau kantor desa dipimpin oleh

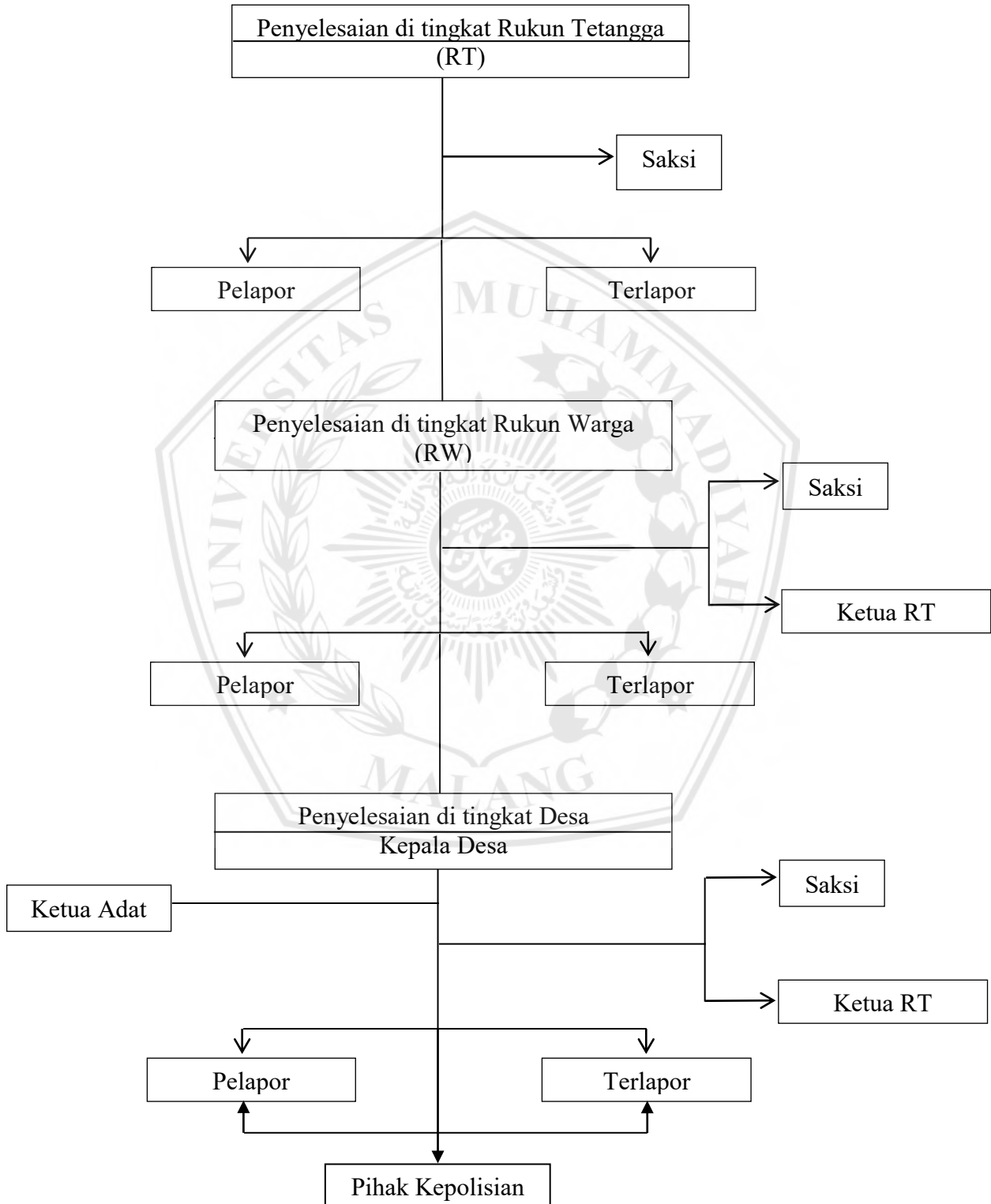
kepala desa. Dengan berdasarkan, bahwasanya yang berwenang menangani segala jenis perbuatan atau yang sifatnya menyangkut tentang ketentraman desa adalah tanggung jawab dari kepala desa. Sedangkan kepala dukun adat hanya menangani hal-hal yang berkaitan dengan tradisi masyarakat suku Tengger saja, dan tidak tidak berwewenang dalam hal yang menyangkut pelanggaran ataupun keamanan desa. Jika dalam proses pejatuhan sanksi terlalu sulit atau tidak adanya titik temu, maka Kepala Dukun adat di desa Ngadas dihadirkan untuk memberikan pertimbangan-pertimbangan dan dijadikan saksi dalam pengambilan keputusan, agar para pihak tidak merasa keputusan yang diambil berat sebelah atau tidak berkeadilan.

Proses penjatuhan sanksi tersebut dilakukan dengan cara bertahap oleh perangkat desa setempat. Pelanggaran yang didasarkan atas laporan dari pihak yang merasa dirugikan (korban) atau Pelapor, ataupun pelaku tindak pidana tersebut (terlapor) tertangkap tangan. Hasil dari laporan itu ditindak lanjuti dan kemudian diproses secara musyawarah yang dimulai dari tingkat RT (Rukun Tetangga), dimana penyelesaian perkara tersebut dipimpin oleh ketua RT setempat. Pelaku dihadirkan di rumah ketua RT untuk menjelaskan duduk perkara yang terjadi atau dengan didasari oleh laporan yang telah dilaporkan oleh pihak yang dirugikan (korban) atau pelapor. Dan apabila tidak menemui titik temu (konsensus), maka perkara tersebut dilanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi yaitu ke tingkat RW (Rukun Warga). Disini ketua RT dan ketua RW berusaha untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan. Jika tidak juga menemukan jalan keluar, maka barulah perkara tersebut di sidangkan di balai desa, dimana kepala desa sebagai pimpinan sidang tersebut. Dan tahap

tingkat desa ini merupakan tahapan tingkat akhir, untuk penyelesaian penjatuhan sanksi menggunakan hukum adat terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam tahapan tingkat akhir ini, peranan kepala dukun sangatlah vital dan diperlukan kehadirannya. Karena bukan hanya sebagai saksi (pengetahuan tentang hukum adat Tengger) saja, tetapi juga sekaligus sebagai orang yang memberikan beberapa pertimbangan-pertimbangan mengenai kebijakan yang akan diterapkan. Peran Kepala Dukun juga sebagai penanggungjawab saat berlangsungnya proses sidang di desa agar tidak terjadi gesekan antara keluarga, baik keluarga yang dirugikan (korban) maupun pihak pelaku (terlapor). Untuk itu kepala dukun juga mempunyai tanggung jawab secara moral untuk menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat adat Tengger. Dalam proses penjatuhan sanksi sendiri, ditekankan untuk menyelesaikan dengan cara kekeluargaan untuk mencari penyelesaian yang baik dan diupayakan secara maksimal untuk mencapai kesepakatan, dan tidak merugikan salah satu pihak, baik pelapor atau korban maupun terlapor. Apabila dalam proses ini, dirasa sulit untuk menemukan suatu keadilan atau satu kata sepakat, maka pihak kepala desa sebagai ketua sidang, menyarankan untuk diselesaikan secara hukum pidana nasional yaitu dengan melaporkan perkara ini kepada pihak kepolisian. Pelaporan yang sudah dilimpahkan kepihak kepolisian atas saran kepala desa/pimpinan sidang adat, artinya perkara atau kasus ini sudah bukan merupakan tanggungjawab adat, adat tidak berkepenting atau tanggung jawab secara moral terhadap putusan yang diambil, apabila penjatuhan hukuman / sanksinya melalui prosedur yang ada dalam hukum nasional.

Bagan Proses Penyelesaian Tindak Pidana yang Diselesaikan Dengan Menggunakan Hukum Adat Tengger di Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang :



Keterangan :

Penyelesaian perkara / pelanggaran diawali pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu RT dan RW. Apabila kemudian tidak terselesaikan maka diambil alih oleh desa. Penyelesaian tingkat RT, RW dan Desa adalah penyelesaian perkara / pelanggaran dengan cara adat setempat dengan melibatkan semua perangkat desa desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang. Dan apabila dalam proses ini tidak ada titik temu atau tidak terselesaikan, maka perkara ini akan dilaporkan ke pihak kepolisian yang kemudian akan diselesaikan menggunakan hukum pidana nasional.

Menurut bapak Pergianto³⁸, apabila si pelaku tidak menerima sanksi yang diberikan oleh adat, ada 2 (dua) akibat atau konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku, yaitu :

1. Kasus akan dilaporkan pihak kepolisian, sebagai tindak lanjut sanksi hukum adat tidak diterima oleh si pelaku;
2. Si pelaku akan di usir dari desa adat Tengger, karena pelaku dianggap tidak patuh lagi terhadap hukum adat setempat, dan tidak lagi percaya terhadap hukum adat Tengger.

Akan tetapi, selama ini pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi adat tidak pernah ada yang menolak hukuman adat yang berupa sanksi denda tersebut.

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan atau proses penyelesaian tindak pidana misalnya dalam kasus tindak pidana pencurian di dalam masyarakat adat Tengger, seperti yang dijelaskan diatas, hukum adat Tengger tidak memerlukan waktu yang terlalu mengikat, seperti halnya di dalam hukum materiil atau hukum pidana nasional yang berpedoman pada asas peradilan yang cepat, biaya ringan dan sederhana. Tindak pidana atau pelanggaran adat dalam masyarakat adat Tengger diselesaikan sesuai dengan perkembangan dalam mencari rasa keadilan dan dengan

³⁸ Hasil wawancara dengan bapak Pergianto selaku pegawai desa, kepala dusun, dan kamituo di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pada Tanggal 23 Bulan 08 Tahun 2018.

bobot pelanggaran tersebut. Waktu yang dibutuhkan bisa satu hari sampai dua hari atau bahkan pernah sampai satu minggu. Penyelesaian bisa cepat, dalam kurun waktu atau dalam hitungan hari, apabila diselesaikan di tingkat RT atau tingkat RW memenuhi kata. Memerlukan waktu yang lama, apabila belum ada kata sepakat dalam sidang adat yang diketuai oleh kepala desa (artinya kasus tersebut sudah masuk dalam tingkat desa) atau pelaku tidak menerima dan mengakui perbuatannya tersebut dan pelaku masih bersikeras untuk mempertahankan diri bahwa dia tidak melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Sehingga diperlukan saksi-saksi dan jika diperlukan dicari barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tersebut.

Penulis beranggapan bahwasanya, penggunaan hukum adat pada masing-masyarakat adat, apabila ditinjau dari proses penjatuhan sanksi adalah sangat berkeprimanusiaan. Artinya dengan proses yang cenderung cepat, sederhana dan biaya ringan ini sangat cocok apabila diterapkan pada masyarakat Indonesia pada umumnya. Selain tidak membebani si pelaku sendiri, cara adat ini lebih manusiawi dengan memotong jangka waktu prosesnya dibandingkan dengan menggunakan hukum nasional, yang dalam prakteknya jangka waktunya lama dan kurangnya transparansi dalam proses di penyidikan dan penuntutan.

Apabila dibandingkan antara hukum adat dengan hukum nasional, soal transparansi. Dalam hukum adat, khususnya adat Tengger, para hakim adat misalnya kepada desa dan kepala dukun sangat menjunjung tinggi, mulai sejak pelaku tertangkap sampai dengan pelaku “diadili” menggunakan hukum adat. Tidak ada nego-nego terkait sanksi apa yang diberikan atau dijatuhkan. Bandingkan dengan

hukum nasional dalam praktiknya, masih saja ada oknum penegak hukum yang coba-coba melakukan nego-nego baik dengan pelaku maupun keluarganya, supaya apabila mendapatkan hukuman yang berat, dapat diringankan melalui proses-proses yang tidak diperkenankan oleh undang-undang.

Menurut Indrawati,³⁹ “Tujuan penerapan sanksi pidana adat adalah untuk mengembalikan ketidakseimbangan yang terjadi sehingga kehidupan yang tentram dan damai dapat tercipta kembali sebagaimana awalnya. Terdapat dua jenis pemberlakuan sanksi yakni sanksi yang diberlakukan untuk pelaku sebagai orang yang melanggar dan sanksi yang berlaku secara kolektif karena berhubungan dengan kehidupan orang banyak. Contoh kasus penerapan sanksi secara perorangan adalah pencurian. Adapun pemberlakuan sanksi secara kolektif dalam hal ini juga berhubungan dengan kedudukan keluarga atas orang yang melakukan pelanggaran sehingga pihak keluarga juga menanggung akibat dari perbuatan anggota keluarganya.”

Dengan demikian, proses penjatuhan sanksi adat ini sangat tepat. Dan yang menjadi persoalan, kenapa orang adat enggan menggunakan hukum nasional, pada kasus tindak pidana ringan? Pertanyaan ini sudah terjawabkan, selain masyarakat adat tengger menjunjung tinggi adat yang diwariskan turun temurun oleh nenek moyang, masyarakat Tengger menjunjung tinggi kerukunan antara warganya. Dan apabila kasus tindak pidana ringan dijatuhi hukuman pidana, nantinya ditakutkan adanya dendam pribadi dari si pelaku. Hal inilah yang coba dihindari oleh pemerintah sekaligus warga masyarakat Tengger dengan terlebih dahulu memenuhi kesepakatan antar para warga.

³⁹ Dara Indrawati. 2013. *Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia (Anaisis Hukum Terhadap Bebebrapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)*. Disertasi. Makassar. Universitas Hasanuddin. Hal. 51.

Putusan Adat Digunakan Sebagai Pertimbangan di dalam Proses Peradilan Umum

Selain mengadili dan memberikan penilaian bagi pihak-pihak yang berperkara, ada fungsi-fungsi lain yang harus tercermin dalam putusan hakim pada Pengadilan Umum yang meliputi fungsi pendidikan hukum bagi masyarakat dan fungsi pembaruan hukum melalui proses penemuan hukum dan penyelesaian konflik secara tuntas⁴⁰. Betapapun cakupannya legislator, selalu saja memiliki keterbatasan, menyangkut waktu (berlakunya), tempat (berlakunya) dan substansi (pengaturannya). Selalu saja terjadi kesenjangan antara statika norma *via a vis* dengan dinamika sosial.

Pada umumnya hakim akan melakukan penelusuran terkait apakah pernah ada yurisprudensi yang berkaitan dengan perkara yang serupa dengan yang ditanganinya. Menurut Ter Haar bahwa apabila tidak ada yurisprudensi atau yurisprudensi yang sudah ada itu sudah tidak sesuai lagi maka hakim harus memutuskan yang menurut keyakinannya bahwa hal itu berlaku menurut keadaan dan perkembangan masyarakat. Maka kewajiban hakim di dalam mengadili menurut hukum adat berarti memberikan bentuk terhadap sesuatu yang dibutuhkan sebagai keputusan hukum berdasarkan sistem hukum, kenyataan sosial, dan asas-asas kemanusiaan.⁴¹

Pada dasarnya, hukum adat yang diakomodasi oleh Pengadilan Umum adalah berkaitan dengan perkara-perkara yang tidak ada bandingannya dengan peraturan-peraturan yang ada dan menggunakan sanksi seperti hukuman kurungan pengganti

⁴⁰ Pontang Moerad, 2005, *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 312.

⁴¹ Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung. Hlm.370.

atau hukuman denda sebagaimana dimaksud hukum pidana yang dikodifikasikan.⁴² Seperti juga yang diterapkan oleh hakim-hakim pengadilan desa merupakan suatu sumber hukum tersendiri untuk peradilan pidana yang keputusannya⁴³ mengandung unsur keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum diharapkan dapat dirasakan secara langsung bagi masyarakat yang mengharapkan penyelesaian masalah kemasyarakatan dengan cara menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal⁴⁴ sehingga sifat penyelesaiannya kekeluargaan dan tidak merusak keselarasan hubungan (keluarga) antar suku.⁴⁵

Dengan demikian, menurut penulis putusan adat dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim, apabila ternyata perkata tindak pidana tertentu dimasukkan kedalam pengadilan umum. Oleh karenanya, menurut Ter Haar diatas apabila terdapat yurisprudensi tentang hal tersebut, seperti halnya hukum adat, maka pertimbangan hukum putusan adat akan dipakai untuk memutuskan suatu perkara.

Efektivitas Penjatuhan Sanksi yang Diberikan Kepada Pelaku Tindak Pidana yang Diselesaikan dengan Menggunakan Hukum Adat dalam Masyarakat Adat Tengger

Pemberlakuan penjatuhan sanksi adat yang dilakukan pada pelaku tindak pidana yang adat di masyarakat adat Tengger, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana penulis telah uraikan pada bab II dalam tinjauan pustaka, bahwasanya dasar berlakunya hukum adat salah

⁴² Budi Suhariyanto, “Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No. 3, Desember 2015, hlm. 414

⁴³ Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 66.

⁴⁴ Tedi Sudrajat, “Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif melalui Media Hakim Perdamaian Desa”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010, hlm.299.

⁴⁵ Umi Rozah, 2012, *Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Pidana*, dalam Agustinus Pohan, et al., 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif, Larasan*, Jakarta, hlm. 309.

satunya ada pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam klausula pasal tersebut, menyebutkan badan peradilan di Indonesia mengakui pemberlakuan hukum adat. Artinya apabila di dalam penyelesaian perkara pidana sudah diputus berdasarkan hukum pidana adat setempat, maka tidak ada hak lagi badan peradilan menjatukan putusannya.

Dalam hal pemberlakuan penjatuhan sanksi adat, juga telah diatur didalam Rancangan Kitap Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), dalam konsepnya Pasal yang berkaitan dengan hukum (sanksi) Pidana Adat atau *The Living Law* dalam RUU KUHP tahun 2015 adalah Pasal 1 dan Pasal 2, yang semula diatur dalam Pasal 1 RUU KUHP sebelumnya.

Pasal 1 Konsep KUHP 2015, menentukan:

- (1). Tiada seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan.
- (2). Dalam menetapkan adanya tindak pidana dilarang menggunakan analogi.

Pasal 2 Konsep KUHP 2015, menentukan :

- (1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan.
- (2). Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa.

Oleh karena itu penulis berpandangan, bahwa berdasarkan perumusan Pasal 2 ayat (2) tersebut, diharapkan dapat menjadi kriteria atau rambu-rambu/pedoman hukum bagi hakim dalam menetapkan “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “*the living law*” sebagai sumber hukum (legalitas materiil).

Hukum Adat Ditinjau Dari Segi Kebudayaan

Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

Dapat penulis simpulkan berdasarkan pengertian pendapat diatas, bahwa Hukum Adat sebagai aspek kebudayaan adalah hukum adat yang dilihat dari sudut pandang nilai, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur sosial religius yang didapat seseorang dengan eksistensinya sebagai anggota masyarakat. Hukum adat merupakan hukum tradisional masyarakat yang merupakan perwujudan dari suatu kebutuhan hidup yang nyata serta merupakan salah satu cara pandangan hidup yang secara keseluruhannya merupakan kebudayaan masyarakat tempat hukum adat tersebut berlaku dan menjadi hukum positif di lingkungan tersebut. Dengan kata lain, apabila kita melakukan studi tentang hukum adat maka kita harus berusaha memahami cara hidup dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan refleksi dari cara berpikir dan struktur kejiwaan bangsa Indonesia.

Dengan demikian, sudah jelaslah bahwasanya hukum adat adalah sebagai aspek kehidupan dan budaya bangsa Indonesia karena struktur kejiwaan dan cara berfikir bangsa Indonesia tercermin lewat hukum adat itu sendiri. Berangkat dari sinilah kemudian hukum adat, apabila diterapkan kepada masyarakat yang mempercayainya sebagai hukum positif mereka, maka akan menjadi relevan. Karena hukum adat yang diterapkan di suatu daerah, sudah mengetahui karakteristik masyarakat lingkup hukum adat tersebut.

Hukum Adat Ditinjau Dari Sosilogi

Hukum secara sosiologi merupakan suatu lembaga kemasyarakatan yang diartikan sebagai suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dari pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi.

Nilai-nilai sosial inilah yang membentuk hukum yang sumbernya atau berasal dari kebiasaan masyarakat, yang kemudian disebut dengan hukum adat. Maka dengan demikian hukum adat sangat bertalian erat dengan sosiologi itu sendiri. Karena pada hakikatnya sosiologi adalah bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi, hukum adat Tenger apabila dilihat dari sudut pandang sosiologi merupakan bagian yang tidak terpisahkan karena masyarakat itu sendirilah yang membentuk hukum itu, yang bertujuan supaya mengatur tingkah laku masyarakat agar nantinya masyarakat terawasi dengan adanya norma-norma yang bersumber dari kebiasaan mereka sendiri.

Hukum Adat Ditinjau Dari Hukum Nasional

Hukum adat tumbuh dari cita-cita dan alam pikiran masyarakat Indonesia. Maka hukum adat dapat dilacak secara kronologis sejak Indonesia terdiri dari kerajaan-kerajaan, yang tersebar di seluruh nusantara. Realitas sosial budaya dikonstruksi oleh pujangga yang satu dikonstruksi oleh pujangga yang lain, serta dikonstruksi kembali pujangga berikutnya.⁴⁶

Posisi hukum adat dalam hukum nasional salah satunya diuraikan dalam penjelasan undang-undang No. 39 Tahun 1999 (TLN No. 3886) Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa hak adat yang secara nyata masih berlaku dan dijunjung tinggi

⁴⁶ Dominikus Rato., *Hukum Adat (Suatu Pengantar Singkat Memahami Hukum Adat di Indonesia)*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, hal 110.

di dalam lingkungan masyarakat hukum adat harus dihormati dan dilindungi dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat bersangkutan dengan memperhatikan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya penjelasan Pasal 6 ayat (2) menyatakan dalam rangka penegakan Hak Asasi Manusia, identitas budaya nasional masyarakat hukum adat yang masih secara nyata dipegang teguh oleh masyarakat hukum adat setempat, tetap dihormati dan dilindungi sepanjang tidak bertentangan dengan asas-asas Negara Hukum yang berintikan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam ketentuan tersebut, bahwa hak adat termasuk hak atas tanah adat dalam artian Perundang-undangan sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2004, maka tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang/ Perpu ;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden ;
5. Peraturan Daerah.

Hal ini tidak memberikan tempat secara formil hukum adat sebagai sumber hukum perundang-undangan, kecuali hukum adat dalam wujud sebagai hukum adat yang secara formal diakui dalam perundang-undangan, kebiasaan, putusan hakim atau atau pendapat para sarjana.

Sehingga penulis beranggapan bahwa hukum adat ini tidak hanya menjadi hukum yang tumbuh dan berkembang di lingkup masyarakat adat saja, akan tetapi juga dapat memberikan sumbangsih kepada masyarakat yang tidak menggunakan hukum adat. Karena dalam hukum adat, didalamnya terdapat nilai, norma dan kaidah baik yang bersumber pada kultur budaya asli Indonesia, dan tidak mengadopsi kultur

budaya asing seperti halnya di dalam hukum nasional. Dalam aspek hukum nasional inilah melihat hukum adat sebagai rangkuman dari sisi kebudayaan dan sisi sosiologis dalam hukum adat.

Efektivitas Penjatuhan Sanksi Adat Tengger terhadap Pelaku Tindak Pidana

Munculnya delik adat pada masyarakat hukum adat Tengger, dimulai sejak adanya suatu perbuatan atau kejahatan yang dilakukan oleh seseorang, dimana perbuatan orang tersebut telah merugikan orang lain, dan mengakibatkan ketidak tentraman dan kenyamanan pada orang yang dirugikan dan masyarakat adat Tengger pada umumnya. Delik adat ini sendiri melahirkan konsekuensi pada pelakunya, konsekuensi ini berupa sanksi. Di dalam hukum adat Tengger tidak mengenal sanksi kurungan atau hukuman penjara. Ini dimaksudkan, untuk tidak membuat pelaku dendam pada pemberi sanksi dan tidak direndahkan harkat, martabat dan harga dirinya.

Menurut Muladi, “Hukum pidana adat dilandasi falsafah harmoni dan communal morality akan bertentangan dengan asas legalitas (principle of legality) yang berporos pada : (1). *Legal definition of crime*, (2). *Punishment should fit the crime*, (3). *Doctrine of free will*, (4). *Death penalty for some offences*, (5). *No empirical research*, dan (6). *Definite sentence*, yang merupakan karakteristik dari aliran klasik. Asas legalitas dalam arti kontemporer dengan spirit yang berbeda dari aslinya, akan lebih demokratis, *spirit* tersebut adalah : (a). *Forward Looking*, (b). *Restoratif Justice*, (c). *Natural Crime*, (d). Integratif”.⁴⁷

Sementara mengenai efektivitas penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana yang diselesaikan dengan menggunakan hukum adat dalam masyarakat adat Tengger, penulis akan menjelaskannya berdasarkan hasil wawancara penelitian

⁴⁷ Muladi, “*Hukum Pidana Adat dalam Kontemplasi tentang Asas Legalitas*”, Makalah dalam seminar “*Relefungsi Hukum Pidana Adat dan Implementasinya dalam Hukum Pidana Nasional*”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 16 – 17 Desember 1994, hlm. 2.

dengan informan-informan selama penelitian berlangsung. Hukum adat Tengger hanya mengatur tentang adat dan tradisi nenek moyang tentang melakukan ucapan syukur kepada *Sang Hyang Widi*. Berkaitan dengan pelanggaran yang mengganggu ketertiban dan hal-hal yang mengganggu kentenraman masyarakat, adat Tengger masih belum memiliki aturan resmi atau aturan hukum adat yang sudah di kodifikasikan atau sudah tertulis⁴⁸. Masyarakat adat Tengger dipengaruhi atau sangat berkaitan erat dengan agama yang dianut yaitu agama Hindu dan Budha. Akan tetapi, masyarakat di wilayah desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, mayoritas masyarakat adat Tengger yang menempati daerah tersebut menganut agama Hindu dan Budha, dimana agama Hindu dan Budha sendiri selalu mengedepankan rasa saling mengasihi dan mengajarkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik, supaya kelak di kemudian hari mereka pengikut Budha akan menjadi manusia yang sempurna.

Dari pengaruh-pengaruh ajaran agama inilah masyarakat adat Tengger memiliki pedoman hidup dalam melakukan perbuatan baik dalam bertindak sehari-hari dan tidak ada niatan untuk menyakiti sesamanya. Bagi masyarakat adat Tengger Pelanggaran adat atau yang disebut oleh masyarakat Tengger *nyalahi unggah-ungguh*, seperti istilah lainnya yang banyak digunakan oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Semua kebudayaan dan adat istiadat masyarakat adat Tengger dipengaruhi oleh kebudayaan agama yang mayoritas dianut oleh masyarakat Tengger yaitu agama

⁴⁸ Joni Iswanto (2002). *Proses Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Menurut Hukum Adat Suku Tengger (Studi dalam suku Tengger, Desa Ngadisari, Sukapura Probolinggo)*. Dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang.

Hindudan Budha, dan juga budaya Jawa yang masih kental dan nampak dengan jelas dari perilaku dan juga cara hidup sehari-hari mereka.

Peristiwa atau perilaku tindak pidana di masyarakat adat Tengger di desa Ngadas sangat jarang terjadi, apabila terjadi suatu tindak pidana hanyalah dianggap suatu pelanggaran saja. Pelanggar tersebut oleh masyarakat adat Tengger disebut dengan *salah alit* atau dalam hukum positif Indonesia termasuk tindak pidana ringan (tipiring). Sebagai salah satu contoh misalnya, salah mengambil pohon dari perbatasan dengan tanah milik tetangga baik dari ladang maupun dari pekarangan, mengambil sayur mayur di ladang milik orang. Dan ada juga tindak pidana yang sifatnya berat atau masyarakat adat Tengger menyebutnya dengan *salah ageng*, dan perilaku atau perbuatan ini hampir tidak pernah terjadi di masyarakat adat Tengger pada umumnya, dan di desa Ngadas Kecamatan Pocokusumo Kabupaten Malang pada khususnya.⁴⁹

Salah satu contoh perilaku tindak pidana yang ada di masyarakat adat Tengger adalah pada tahun 1999 diketahui ada pelaku yang mengambil pohon dan juga mengambil sayur mayur milik orang lain. Perilaku tersebut oleh sebagian masyarakat adat Tengger dianggap sebagai perilaku masyarakat yang melanggar adat. Oleh karenanya, perilaku atau perbuatan mengambil barang yang bukan miliknya sendiri itu oleh masyarakat adat Tengger dianggap sebagai tindakan yang sangat tabu dan telah melanggar adat yang telah mereka junjung tinggi secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Pelaku tersebut kemudian di proses menggunakan hukum adat. Dalam proses tersebut, di proses sampai tingkat desa dan dihadiri oleh Ketua dukun adat Tengger di desa Ngadas sebagai penengah atau mediator dalam jalannya sebuah diskusi / sidang adat tersebut. Tidak ada aturan adat tertulis pada waktu itu tentang hukuman bagi pelaku / terlapor dalam sistem hukum adat di Tengger. Kebanyakan untuk hal yang bersifat pidana ringan seperti kasus pencurian ini bisa

⁴⁹ Hasil wawancara dengan bapak Suprianto selaku tokoh pemuda adat, karang taruna sekaligus ketua RT 05, di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pada Tanggal 29 Bulan 08 Tahun 2018.

diselesaikan dengan hanya media diskusi oleh pelapor / korban dan terlapor / pelaku serta dihadiri seluruh masyarakat asli suku Tengger. Terlapor kemudian dianggap bersalah, sebagai sanksinya pelaku di denda dengan menanam pohon sesuai dengan kesepakatan adat, sebagai pengganti pohon yang telah pelaku ambil. Sanksi adat ini diterapkan pada tahun 1999, dan berbeda dengan sanksi adat yang sekarang yang sudah disepakati oleh masyarakat adat Tengger di desa Ngadas.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang menyalahi *unggah ungguh* masyarakat adat Tengger seperti halnya pencurian sayur mayur, dijatuhi atau diberikan sanksi berupa denda adat berupa denda 50 (lima puluh) sak semen. Tujuannya adalah untuk membuat jerah pelaku pencurian, karena bagi masyarakat adat Tengger jumlah tersebut terbilang cukup besar apabila dibandingkan dengan jumlah sayur mayur yang di curi atau diambil dari ladang milik orang. Sanksi yang berupa denda itu tidak diberikan kepada korban atau pihak yang dirugikan, akan tetapi denda 50 (lima puluh) sak semen tadi diperuntukkan untuk pembangunan di daerah sekitar rumah korban atau lingkup RT, misalnya untuk perbaikan jalan, pembangunan pos kampling, atau untuk pembangunan sarana dan prasana wilayah di RT korban tersebut.⁵⁰

Lain halnya sanksi yang diberikan kepada pelaku pencurian sayur mayur. Pelaku tindak pidana pencurian atau mengambil pohon dari perbatasan dengan tanah milik tetangga baik dari ladang maupun dari pekarangan, penjatuhan sanksi berbeda. Sanksi yang diberikan adalah berupa denda 50 (lima puluh) sak semen dan juga berupa denda menanam pohon sebanyak yang di tentukan oleh hasil sidang yang dilaksanakan di desa dengan diketuai oleh kepala desa dan di saksikan oleh kepala dukun dan tokoh adat setempat. Diharapkan sanksi ini membuat pelaku jerah dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali. Ada tujuan yang lain dari pemberian sanksi tersebut, yaitu selain untuk sebagai pengganti pohon yang telah diambil atau

⁵⁰ Hasil wawancara dengan bapak Pergianto selaku pegawai desa, kepala dusun, dan kamituo di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pada Tanggal 03 Bulan 09 Tahun 2018.

ditebang, diharapkan pohon yang telah ditanam oleh pelaku tersebut, dapat dinikmati anak cucu kelak, sekaligus untuk melestarikan alam sekitar.⁵¹

Dari beberapa kasus tindak pidana di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, yang pelakunya dikenakan hukum adat atau sanksi adat. Menurut bapak Pergianto selaku kamituo desa Ngadas⁵², penjatuhan sanksi tersebut sangat efektif, dibuktikan dengan tidak adanya pelaku tindak pidana seperti pencurian dalam kurun waktu 19 tahun terakhir ini dan pelaku yang dijatuhi hukuman adat tidak mengulangi kembali melakukan perbuatannya tersebut. Dan dapat dilihat dari data kantor desa Ngadas, dimana tindak pidana di desa Ngadas selama kurun waktu beberapa tahun terakhir ini tidak ada kejadian pencurian atau tindak pidana lain yang sifatnya merugikan masyarakat. Dan penjatuhan sanksi ini sebagai bahan pembelajaran bagi warga masyarakat lain untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran baik itu pelanggaran hukum pidana nasional maupun pelanggaran-pelanggaran adat setempat. Karena disamping diberikan sanksi berupa denda, pelaku tindak pidana akan merasakan sanksi sosial dari masyarakat.

Sanksi berasal dari kata *sanctum* yaitu bahasa latin yang berarti penegasan yang juga disebut dengan *bevestiging/bekrachtiging*. Penegasan tersebut bisa berarti hal yang positif yaitu hadiah dan juga dapat bersifat negatif seperti hukuman. Oleh

⁵¹ Hasil wawancara dengan bapak Sutomo selaku kepala dukun untuk wilayah desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pada Tanggal 29 Bulan 08 Tahun 2018.

⁵² Hasil wawancara dengan bapak Pergianto selaku pegawai desa, kepala dusun, dan kamituo di desa Ngadas Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, pada Tanggal 03 Bulan 09 Tahun 2018.

karena itu sanksi dikatakan sebagai perangsang dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.⁵³

Menurut Widnyana,⁵⁴ “bahwa sanksi merupakan bagian dari kaidah hukum dan atas dasar tersebut maka ini dapat menjadi bukti sebagai kategori hukum yang modern. Hal tersebut juga seperti dengan pemberlakuan hukum pidana di berbagai Negara. Sanksi yang ada dalam hukum adat memiliki tujuan untuk menetralkan kembali atau mengembalikan fungsi-fungsi kehidupan bermasyarakat yang menjadi tidak seimbang akibat adanya pelanggaran yang dilakukan.”

Sanksi adat, terutama sanksi adat pada masyarakat adat Tengger sangatlah efektif, sebagaimana keterangan bapak Pergianto diatas. Bahwa masyarakat adat Tengger khususnya, sangat menghormati dan menjunjung tinggi adat yang mereka, selain tunduk dan patuh terhadap agama yang dianut, masyarakat adat Tengger juga melestarikan apa yang sudah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang. Untuk itu, semua masyarakat adat Tengger wajib menjaga, melestarikan dan menghormati hukum adat Tengger sebagai hukum kebiasaan mereka.

Untuk masyarakat adat Tengger sendiri, tunduk pada sanksi adat adalah suatu keharusan. Karena apabila mereka tidak tunduk sanksi hukum adat yang sudah dijatuhkan pada mereka, maka salah satu konsekuensi yang harus diterima adalah diusir dari daerah tersebut. Padahal mayoritas penduduk adat di desa Tengger berprofesi sebagai petani, maka apabila diusir dari daerah adat selain kehilangan kerabat, orang tidak tunduk pada sanksi adat juga akan kehilangan mata pencaharian mereka. Disinilah salah satu wujud keefektifan hukum adat yang mengikat dan dijunjung tinggi oleh masyarakat adat Tengger.

⁵³ I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Press. Hal. 20.

⁵⁴ I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco. Hal. 19.

Sebagaimana menurut Hans Kelsen dalam Achmad Ali⁵⁵, “efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi”.

I Made Widnyana menjelaskan bahwa terdapat enam wujud dari sanksi pidana adat, yaitu:⁵⁶

- a. Adanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku sehingga pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;
- b. Upacara adat merupakan salah satu prosesi dalam pelaksanaan sanksi tersebut ;
- c. Keseimbangan kosmis menjadi tujuan yang juga diprioritaskan dalam penerapan sanksi adat ;
- d. Eksistensi dari pemberlakuan sanksi adat tidak lepas dari proses perkembangan masyarakat itu sendiri ;
- e. Sanksi adat diterapkan diluar pengadilan ;
- f. Sanksi adat memiliki bentuk yang variatif.

Dengan demikian penulis beranggapan, bahwasannya penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang penyelesaian tindak pidana tersebut menggunakan hukum adat adalah sangat efektif. Di karenakan berdasarkan data yang di himpun dari berbagai narasumber dan data statistik yang ada di daerah desa Ngadas Kecamatan Poncokusuma Kabupaten Malang, pelaku tindak pidana yang dijatuhi sanksi tersebut tidak pernah mengulangi tindak pidana atau perbuatannya lagi, setelah di jatuhi sanksi atau hukuman berupa denda oleh adat. Dan berbanding terbalik dengan hukum nasional. Dimana masih saja terjadi pelaku tindak pidana, mengulangi perbuatannya kembali atau dalam KUHP disebut sebagai *residivis*. Ini merupakan gambaran, bahwa sanksi berupa hukuman penjara tidak membuat pelaku merasa jera. Menurut hemat penulis di dalam penjara, pelaku tindak pidana berkumpul dengan pelaku lainnya.

⁵⁵ *Ibid*, Achmad Ali. Hal. 374

⁵⁶ *Ibid*, I Made Widnyana. Hal. 19.

Misalnya dalam kasus pencurian apabila pelaku tindak pidana pencurian digabungkan dengan pelaku pencurian lainnya, maka di dalam penjara mereka akan saling berbagi ilmu, melatih atau mengembangkan perbuatan kejahatan mereka.

Dengan demikian, hukum pidana adat dan *The Living Law* termasuk Sanksi adatnya, mendapat tempat dalam pembaharuan perkembangan hukum pidana nasional baik sebagai sumber hukum pidana yang positif maupun sumber hukum pidana yang negatif. Serta sangat beralasan atau mendapat pembenaran tidak hanya berdasarkan praktik hukum kebiasaan nasional, tetapi juga di dunia internasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penjatuhan sanksi adat dirasa sangat efektif diterapkan di daerah adat Tengger. Karena masyarakatnya yang patuh dan taat terhadap hukum adat yang dipercayahi dan di wariskan turun temurun dari nenek moyang mereka. Sanksi yang tegas, tetapi tidak memberatkan dijatuhkan untuk pelanggar aturan atau norma-norma, baik aturan atau norma-norma huku yang diatur di dalam hukum nasional maupun pelanggaran adat. Keefektifan penjatuhan sanksi ini tidak luput dari kepercayaan dan keyakinan mereka terhadap agama yang mereka anut. Keefektifan sanksi adat itu tidak muncul begitu saja, faktor-faktor diluar agama atau kepercayaan juga memberikan pengaruh, seperti halnya sosialisasi terhadap hukum adat yang diberikan oleh tokoh-tokoh adat kepada masyarakat, terutama pemuda sebagai penerus pelestari hukum adat nantinya. Ini dilakukan sebagai bentuk pembentengan bagi para pemuda agar tidak melakukan hal-hal yang akan merugikan orang lain dan juga agar pemuda mau belajar dan mempelajari hukum adat, supaya hukum adat ini tidak hilang ataupun punah.

Saran

Dalam hal kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), salah satu contohnya yang diatur didalam undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), dalam bentuk sanksinya yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana tersebut, tidak hanya ada sanksi kurungan dan denda saja, akan tetapi perlu ditambah dan/ atau diberikan *subsider* hukuman kerja sosial (sanksi sosial) untuk memberikan rasa malu pada pelaku tindak pidana korupsi yang semakin hari, perbuatan tersebut semakin masif dan seolah-olah sudah sebagai budaya “dikalangan yang mempunyai kepentingan”. Inilah sebagai bentuk menumbuh kembangkan budaya malu pada masyarakat Indonesia yang semakin lama, semakin hilang. Sehingga kedepannya, dengan unsur-unsur hukum adat (utamanya hukum pidana adat) yang masuk dalam setiap *sel* undang-undang kita, yang dibentuk oleh legislator, dapat menimbulkan efek *prevention* (pencegahan), tidak hanya tindak pidana korupsi semata dan juga terhadap tindak kejahatan lainnya. Proses penjatuhan sanksi dalam masyarakat adat Tengger sangat manusiawi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Amiruddin, Muhammad dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- , 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Atang Ranoemihardja, R, 1984. *Hukum Pidana Asas-asas, pokok pengertian dan teori serta pendapat beberapa sarjana*, Tarsito: Bandung.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2007. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita: Jakarta.
- Dewi Wulansari. 2010. *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Dudu Duswara Machmudin. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum sebuah sketsa*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ekaputra, Mohammad dan Khair, Abul, 2009. *Percobaan dan Peyertaan*. USU Press: Medan.
- I Made Suartha. 2015. *Hukum dan Sanksi Adat*. Malang: Setara Press.
- I Made Widnyana. 1993. *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, Bandung: PT. Eresco.
- Marpaung, Laden, 1991. *Unsur-unsur perbuatan yang dapat dihukum (delik)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *asas-asas hukum pidana*, rineka cipta Jakarta.
- Muhammad, Bushar. 1981. *Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita.

- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni: Bandung
- Oemar Seno Adji, 1980, *Hukum-Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Ratno, Lukito. 2008. *Tradisi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Teras
- Samsul Ramli dan Fahrurrazi. 2014. *Bacaan Wajib Swakelola Pengadaan Barang/Jasa*. Visimedia Pustaka: Jakarta.
- Sholehuddin, 2002. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soemadiningrat, Otje Salman, 2002. *Rekapitulasi Hukum adat Kontemporer*. PT. Alumni:Bandung.
- Soepomo, R. 2003. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: PT. Sentra Sarana Abadi.
- Sudarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Edisi I, Cet.III, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 71-72. P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Edisi II, Cet. I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudiyat, Imam. 1981. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty.
- Sutarto, Ayu. 2008. *Kamus Budaya dan Religi Tengger*. Jember : Lembaga Penelitian Universitas Jember.
- Tolib Setiady, 2009, *Intisari Hukum Adat Indonesia (dalam Kajian Kepustakaan)*, Alfabeta, Bandung.
- Tongat, 2018. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*. UMMPers : Malang.
- Tri Andrisman, *Hukum Pidana*. , 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Umi Rozah, 2012, *Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Pidana*, dalam Agustinus Pohan, et al., 2012, *Hukum Pidana dalam Perspektif*, Larasan, Jakarta.

Wignjodipoero, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.

Yahya, M Harahap. 1993. *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat dalam Hukum Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

B. Disertasi

Dara Indrawati. 2013. *Eksistensi Hukum Adat Pidana Sebagai Hukum Positif Indonesia (Anaisis Hukum Terhadap Bebebrapa Delik Kesusilaan Putusan Pengadilan)*. Disertasi. Makassar. Universitas Hasanuddin.

C. Jurnal

A. Istiqlal Assaad dalam jurnal *Hakikat Sanksi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Studi Tentang Pidana Mati)*, Vol. 19 No. 01 Januari-April 2017

Budi Suhariyanto, “*Eksistensi Pembentukan Hukum oleh Hakim dalam Dinamika Politik Legislasi di Indonesia*”, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 4 No. 3, Desember 2015.

Hasanah Hasyim “teknik-teknik observasi (sebuah alternative metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosiaol), dalam jurnal at-taqaddum, vol 8, no 1, juli 2016

Harahap Nursapia “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam jurnal *iqra*’ volume 8, no 1, mei 2014,(Medan : IAIN-SU Medan)

Hadi Sutrisno dalam Nursapia Harahap “*Penelitian Kepustakaan*”, dalam jurnal *iqra*’ volume 8, no 1, mei 2014

Rachmawati Imami Nur dalam “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara”, dalam *Jurnal Keperawatan Indonesia*, Volume 11 No 1 Maret 2007.

Tedi Sudrajat, “*Aspirasi Reformasi Hukum dan Penegakan Hukum Progresif melalui Media Hakim Perdamaian Desa*”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10 No. 3, September 2010.

D. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

E. Internet

hukumonline.com, *Yurisprudensi Hukum Pidana Adat*, (di akses pada 27 Oktober 2016).

www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-sanksi/ (diakses pada tanggal 23 Agustus 2018, pukul 12.17 WIB).

